

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung

Yogi Suprayogi Sugandi*

Abstrak

Masalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan, seperti kekurangan makanan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, gizi buruk, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang kompleks dan multidimensi sehingga untuk mengatasinya diperlukan suatu upaya kolektif dari pemerintah dan masyarakat dalam menyusun dan menerapkan strategi yang komprehensif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Untuk wilayah perkotaan, upaya itu diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). P2KP hadir untuk melaksanakan amanat Program Pembangunan Nasional yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera ditangani. P2KP membawa paradigma baru bahwa untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan diperlukan suatu pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas sehingga dalam proses pelaksanaan program perlu dilakukan upaya-upaya tertentu yang harus dilakukan oleh komunitas itu sendiri dengan sasaran utama adalah masyarakat miskin di tingkat kelurahan di perkotaan. Usaha mendorong kemandirian dan kemitraan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan Indonesia telah dilakukan melalui P2KP tahap pertama, kedua, dan ketiga, yang kemudian dilanjutkan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Kata Kunci: Program, Penanggulangan Kemiskinan dan Perkotaan

Abstract

The social problems faced by the Indonesian people are affected by poverty conditions, such as food shortage, education, health, unemployment, malnutrition, and others. Poverty is a complex and multidimensional development problem. Thus, in order to overcome poverty, a collective effort needs to be done by involving the government and society in developing and implementing comprehensive, integrated, effective, and sustainable strategies. In urban areas, such effort is realized by the Indonesian Government by way of Urban Poverty Program (P2KP). P2KP is present to carry out the mandate of the National Development Program that puts poverty alleviation as an urgent priority for to be addressed immediately. P2KP brings a new paradigm in tackling poverty in sustainable manner by making use of an approach based on the principles of community empowerment so that the program implementation process should contain specific efforts that are done by the community with the primary target is the urban poor people in kelurahan. Several efforts to encourage self-reliance and partnership between community and regional government in elevating urban poverty in Indonesia have been conducted through P2KP in three stages, continued as the National Community Empowerment Program for Urban Community (PNPM Mandiri Perkotaan).

Keywords: Program, Poverty Alleviation and Urban

I. Pendahuluan

Antara pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, atau selama masa pemerintahan Orde Baru, tingkat kemiskinan

di Indonesia, baik di desa maupun di kota, berhasil ditekan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan adanya program-program penanggulangan kemi-

*Departemen Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Bandung.
yogi.suprayogi@unpad.ac.id.

skinan yang efisien. Pada masa itu, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di bawah garis kemiskinan senantiasa menurun, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja. Namun, ketika pada tahun 1998 terjadi krisis keuangan di Asia, tingkat kemiskinan di Indonesia pun kembali melejit tinggi, dari yang 11 persen menjadi 19,9 persen pada akhir tahun 1998.

Pada tahun 2000, 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York. Agenda utama dalam pertemuan puncak ini adalah pembahasan tentang tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Deklarasi Milenium. Indonesia termasuk salah satu di antara 189 negara di dunia yang turut serta menandatangani deklarasi tersebut. Deklarasi ini mencanangkan upaya, sasaran dan target-target pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan yang dikenal dengan nama Millennium Development Goals (MDGs). Pada intinya, deklarasi tersebut merupakan komitmen global untuk menurunkan tingkat kemiskinan global dengan delapan butir tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015.

MDGs menargetkan untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Target ini menjadi tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia sebagaimana diuraikan dalam Deklarasi Milenium tersebut, yang kemudian diadopsi oleh 189 negara dan

ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York September 2000. Di dalam MDGs tidak ada perbedaan antara negara kaya atau miskin, karena sebagai bagian dari masyarakat global, setiap negara memiliki target dan tujuan yang sama, yaitu memerangi kemiskinan.

Deklarasi Milenium berisi komitmen setiap negara dan komunitas internasional untuk mencapai 8 tujuan pembangunan pada milenium ini, sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Delapan tujuan pembangunan yang disepakati dalam Deklarasi Milenium PBB itu adalah sebagai berikut.

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
 - a) Pendapatan populasi dunia sehari \$10000.
 - b) Menurunkan angka kemiskinan.
- 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.
- 4) Menurunkan angka kematian anak
 - Target untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu

- Target untuk 2015 adalah Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
 - Target untuk 2015 adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup
 - a) Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.
 - b) Pada tahun 2015 diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat.
 - c) Pada tahun 2020 diharapkan dapat mencapai pembangunan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
 - a) Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
 - b) Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan tarif dan kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
 - c) Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
 - d) Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertim-bangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
 - e) Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
 - f) Dalam kerja sama dengan pihak “pharmaceutical”, menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang.
 - g) Dalam kerja sama dengan pihak swasta, membangun adanya pe-nyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, ter-

utama teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam deklarasi tersebut di atas, jelas bahwa masalah kemiskinan mendapat prioritas pertama untuk segera ditangani.

Tingkat kemiskinan di Indonesia sebenarnya menunjukkan kecenderungan menurun, namun pergerakan dalam satu dekade terakhir mengalami perlambatan, bahkan mulai merayap naik lagi pada awal 2015. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2015 menunjukkan, 11,22 persen atau sebanyak 28,59 juta orang masih hidup dalam kemiskinan. Padahal, sejak awal dekade 1970-an, pemerintah telah gear melaksanakan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan*.

Di samping masalah kemiskinan, masalah ketimpangan di Indonesia juga masih cukup tinggi dan cenderung meningkat. Menurut data BPS, Rasio Gini Indonesia** pada tahun 1999 adalah sebesar 0,31 dan dalam perkembangannya mengalami peningkatan hingga 0,41 pada 2014. Sedangkan menurut Bank Dunia, pada rentang tahun 2003 sampai 2010, konsumsi per kapita 10 persen penduduk terkaya di Indonesia naik lebih dari 6 persen per tahun setelah memperhitungkan inflasi, sementara konsumsi 40 persen penduduk termiskin hanya naik kurang dari 2 persen per tahun. Pada dua tabel di bawah ini dapat terlihat angka kemiskinan di Indonesia, baik secara

relatif maupun absolut, dan persentasenya sejak tahun 2006.

Tabel 1

Statistik Kemiskinan dan Ketidakse-

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	17,8	16,6	15,4	14,2	13,3	12,5	11,7	11,5	11,0
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	39	37	35	33	31	30	29	29	28
Koefisien Gini/ Rasio Gini	-	0,35	0,35	0,37	0,38	0,41	0,41	0,41	-

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 2

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah, 1996-2006

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,37	19,51	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75

Sumber: Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2007

Berdasarkan data di atas, angka kemiskinan di perkotaan meningkat dari 9,42 juta tahun 1996 menjadi 17,6 juta pada tahun 1998. Pada lima tahun berikutnya, angka tersebut terus naik mencapai 12,40 juta per Maret 2006, meskipun secara persentase justru menurun (12,13% tahun 2004 dan 19,51% pada Maret 2006) karena angka batas kemiskinan ditingkatkan pada awal 2006 itu.

Jika hanya melihat statistik di atas, sepintas terlihat bahwa kemiskinan di perkotaan masih lebih baik daripada di perdesaan, se-

* Sumber: <http://dikti.go.id/upaya-penanggulangan-kemiskinan-di-indonesia-terhambat-persoalan-parameter-dan-perspektif/>

** Indeks yang mengukur tingkat kesenjangan sosial di masyarakat.

hingga kemiskinan di per-kotaan dipandang belum menjadi masalah urgen, setidaknya dibandingkan kemiskinan di perdesaan. Namun demikian, tentunya pemerintah tidak boleh membedakan antara kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan. Keduanya tetap harus mendapat perhatian serius dan prioritas yang sama untuk segera diatasi.

II. Kajian Literatur

Pengertian Kemiskinan dan Kemiskinan Perkotaan

Definisi tentang kemiskinan mengalami perluasan seiring dengan semakin kompleksnya faktor-faktor penyebabnya, indikatornya, maupun permasalahan lain yang melingkupi kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan kini tidak hanya dipandang sebagai dimensi ekonomi, melainkan telah meluas hingga mencakup dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik (2014) kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Ada dua kategori kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara. Contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan di bawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira-kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki-laki dewasa).

Adapun kemiskinan relatif ada-

lah ke-miskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat kehidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2 per hari. Dengan definisi ini maka diperkirakan pada tahun 2001 terdapat 1,1 miliar orang di dunia yang pendapatannya kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang di dunia yang pendapatannya kurang dari \$2/hari. ***

Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai “sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi.”

Bank Dunia mendefinisikan kategori “sangat miskin” sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari PPP \$1 per hari, dan kategori “miskin” dengan pen-

apatan kurang dari PPP\$2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan “sangat

*** *The World Bank, 2007, Understanding Poverty.*

miskin”, dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut “miskin”, pada tahun 2001.

Bank Dunia menyebutkan bahwa pada tahun 1988 kaum miskin kota menyumbang 25 persen dari penduduk perkotaan di Dunia Ketiga atau 330 juta orang (Bank Dunia: 1990). Bahkan, sebagai akibat dari pertumbuhan perkotaan, pada tahun 2000 mayoritas miskin absolut di dunia akan tinggal di daerah perkotaan (Wratten, E: 1995). Dari begitu banyak bukti di Asia, Afrika dan Amerika Latin, kaum miskin perkotaan telah menderita secara tidak proporsional dari proses penyesuaian. Hal ini karena: perubahan harga (dan pengurangan subsidi), khususnya peningkatan dalam proses makanan dan biaya jasa; pembatasan tingkat upah dan pengurangan lapangan kerja; dan pemotongan belanja publik (kesehatan dan pendidikan) dan pengeluaran infrastruktur perkotaan (Holland, J: 1994).

Kemiskinan dicirikan oleh tingkat pendapatan yang tidak cukup untuk memasok kebutuhan nutrisi dan kebutuhan dasar non-makanan (Barry J.L., et al. 1997). Kemiskinan didefinisikan dalam hal orang yang hidup dengan kurang dari \$1 per hari (1/6 penduduk dunia, sekitar 1 miliar orang). Para peneliti di Earth Institute di Columbia University mengambil pendekatan “kemiskinan kebutuhan manusia”, dengan menyebutkan beberapa penyebab kemiskinan: kelaparan, akses terhadap perawatan kesehatan dan air, energi, hambatan perdagangan, kualitas gender, akses terhadap pendidikan (Earth Institute, 22/12/2004). Kemiskinan adalah konsep multi

dimensi, yang melibatkan tingkat pendapatan yang rendah, kerawanan pangan, kualitas hidup yang buruk, tidak memiliki tanah atau aset, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, kerentanan dan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, ketidaksetaraan gender, ketidakamanan manusia, kurangnya hak atas informasi, dan kurangnya hak asasi manusia.

Sebagian besar ekonom mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk dapat mencapai standar hidup (Ravallion: 1994). Kemiskinan dapat dikatakan ada dalam suatu masyarakat tertentu ketika satu atau lebih orang tidak mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang dianggap merupakan tingkat minimal yang wajar sesuai dengan standar masyarakatnya. Berdasarkan definisi Ravallion tentang kemiskinan yang menunjukkan konsep kemiskinan atau apa itu kemiskinan, bahwa kemiskinan itu sangat ditentukan oleh norma, nilai, dan kondisi dari suatu masyarakat, maka mungkin sulit untuk melakukan perbandingan antar-negara dan masyarakat, karena secara faktual terdapat perbedaan sifat dan struktur kemiskinan antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Namun, kata kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga profil yang berbeda: termiskin, yang digambarkan sebagai “orang miskin melarat”, “miskin structural”, dan “miskin bergerak” (Kozel, V: 1999).

Dalam makalah *Poverty Alleviation: Pakistan's Experience* yang disajikan di Center for Poverty and Development Studies University of Malay, pada Juli 2007, di Kuala Lumpur, Malaysia, Muhammad

Ayub Siddiqui memaparkan tentang cara meng-ukur kemiskinan dengan memperhatikan be-berapa pendekatan kemiskinan di banyak negara.

Pendekatan Asupan Kalori

Kecukupan diidentifikasi sebagai kepuasan kebutuhan nutrisi/kalori. Oleh karena itu, kebutuhan kalori disarankan sebagai dasar untuk menentukan kriteria kemiskinan. Berdasarkan data dari survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (HIEs), konsumsi makanan ditambah dengan sejumlah kalori yang dihitung. Kecukupan kalori dipandang sebagai standar kesejahteraan dan ukuran yang paling berguna dari kemiskinan absolut (Ercelawn: 1990). Studi tersebut mengacu pada perhitungan jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh jumlah minimum kalori. Studi yang berbeda menggunakan berbagai kebutuhan minimum kalori (Naseem: 1997) dan kebutuhan pengeluaran untuk asupan kalori ini. Indonesia pernah menggunakan pendekatan ini untuk mengukur kemiskinan pada era 1980-1995.

Masalah dengan pendekatan asupan kalori adalah bahwa kebutuhan kalori tidak dapat digeneralisasi untuk semua individu dan untuk semua wilayah. Kebutuhan kalori akan berbeda di zona iklim yang berbeda (Sukhtame: 1982 dan Lipton: 1983). Menggunakan norma gizi pada dasarnya adalah tugas ahli gizi dan mereka telah mencoba untuk mengatur norma-norma gizi dari waktu ke waktu yang akan memastikan kesehatan yang normal. Peneliti harus bergantung pada mereka dan menghormati

keputusan mereka.

Pendekatan Kebutuhan Dasar

Dalam memperoleh angka kemiskinan, salah satunya bisa dilakukan dengan membuat “garis kemiskinan makanan” yang didasarkan pada gagasan tentang jumlah minimal uang yang perlu dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membeli beberapa kebutuhan dasar makanan. Jika biaya kebutuhan dasar diperkirakan, maka garis kemiskinan makanan ditambahkan dengan kebutuhan non-makanan adalah sama dengan garis kemiskinan secara keseluruhan. Pendekatan ini digunakan jauh lebih awal untuk penentuan garis kemiskinan oleh Booth (1892), Rowntree (1892) dan Orchansky (1965, 1968).

Pada awal 1990, Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Pendekatan ini memang lebih mudah dalam menghitung berapa banyak makanan dan non-makanan yang telah dikeluarkan per bulan per kapita dan per rupiah (Nilai tukar mata uang Indonesia saat itu US\$1 = Rp. 9.000).

Kemiskinan Relatif

Garis kemiskinan relatif bersifat tidak tetap dalam suatu perbandingan kemiskinan. Garis kemiskinan relatif terkait dengan rata-rata pendapatan atau konsumsi di negara/ kawasan yang menjadi acuan. Garis ini terkait dengan standar rata-rata hidup dari masyarakat tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan pendapatan rata-rata rumah tangga. Pendekatan ini mungkin menunjukkan pengurangan ke-

miskinan ketika pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Contoh berikut akan meng-gambarkan garis kemiskinan relatif. Tingkat kemiskinan resmi pada awal 1990-an di Amerika Serikat adalah sekitar 15% dan juga sekitar 15% di Indonesia (yang jauh lebih miskin). Banyak dari mereka yang dianggap miskin di AS akan dianggap tidak miskin jika diukur dengan standar Indonesia. Di antara negara-negara OECD/ Uni Eropa, garis kemiskinan sering ditetapkan pada 50% dari pendapatan rata-rata di negara itu (atau 50% dari pendapatan rata-rata). Garis kemiskinan relatif sering digunakan di negara-negara kaya. Hal ini selaras dengan temuan penelitian yang pernah dilakukan (Yogi: 2006) tentang kemiskinan perkotaan di Bandung, Indonesia dan Kuala Lumpur, Malaysia. Studi tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengetahui kemiskinan di 2 negara ini. Indonesia biasanya menggunakan Pendekatan Ke-bu-tuhan Dasar, sedangkan Malaysia meng-gunakan Kemiskinan Relatif.

Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa pembangunan perkotaan yang hanya berfokus pada situasi ekonomi dan fisik tanpa memberikan perhatian yang tepat untuk pembangunan manusia seperti pengentasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan, akan menyebabkan masalah sosial dan politik di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pemberantasan kemiskinan perkotaan sangat penting, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal itu menjadi prasyarat dalam membuat upaya besar untuk mereformasi kehidupan politik dan untuk meningkatkan

pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, struktur ekonomi dan sistem peradilan dan hukum. Dalam rangka mencapai reformasi pembangunan yang berhasil, Indonesia harus mampu memecahkan masalah kemiskinan secara efektif. Ini harus didasarkan pada analisis yang cermat dan pemahaman mendalam tentang masalah intinya. Pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan kapasitas dalam memfasilitasi proses partisipatif yang melibatkan kaum miskin itu sendiri, karena di masa lalu pemerintah cenderung lebih baik dalam bekerja untuk rakyat dan agak kurang baik dalam bekerja dengan orang-orang.

Secara umum, kemiskinan perkotaan di Indonesia dapat dipilah menjadi karakteristik struktural dan transien. Secara struktural, kemiskinan perkotaan berkaitan dengan pembangunan sosial-ekonomi dan kependudukan, sedangkan karakteristik transien lebih berhubungan dengan krisis di Indonesia yang dimulai pada tahun 1997.

Warga Miskin Kota di Indonesia

Dalam hal kemiskinan absolut, PLI (*Poverty Line Income*) adalah tingkat pendapatan yang cukup bagi seorang individu untuk menikmati standar hidup minimum di masyarakat. Kemiskinan di Indonesia diukur dengan PLI seperti makanan, pengeluaran non-makanan yang didasarkan pada kebutuhan sehari-hari. Misalnya, jumlah penduduk miskin (penduduk di bawah garis kemiskinan) pada Maret 2006 adalah 39,05 juta orang (17,75%), jika dibandingkan dengan Feb-ruari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97%), itu berarti

ada peningkatan 3,95 juta orang. Persentase penduduk miskin antara perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah, karena pada Maret 2006 sebagian besar penduduk miskin (63,41%) berada di perdesaan.

Peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan lebih tinggi dari komoditas non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2006, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan adalah 74,99%. Komoditas pangan mempengaruhi garis kemiskinan adalah beras, gula putih, minyak kelapa, telur dan mie instan (orang Indonesia menyebutnya “Sembako”). Untuk komoditas non-makanan ada biaya perumahan. Khusus untuk daerah perkotaan, biaya listrik, transportasi umum dan minyak tanah memiliki ketergantungan yang tinggi. Sementara untuk daerah perdesaan relatif rendah (kurang dari 2%). Ada pergeseran antara penduduk miskin dan hampir miskin pada periode Februari 2005-Maret 2006. Ada 56,51% penduduk miskin pada bulan Februari 2005 yang dikelompokkan sebagai penduduk miskin pada Maret 2006, sementara yang lain bergeser menjadi tidak miskin. Sementara 30,29% penduduk hampir miskin pada bulan Februari 2005 lalu mengalami penurunan menjadi miskin pada Maret 2006. Pada saat yang sama, hampir 11,82% penduduk tidak miskin pada Februari 2005 juga mengalami penurunan menjadi miskin pada Maret 2006. Walaupun 2,29% penduduk tidak miskin turun menjadi miskin pada Maret 2006. Pergeseran posisi penduduk ini menunjukkan kemiskinan sementara (kemiskinan temporer)

meningkat lebih tinggi.

Dari peninjauan informasi statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemiskinan di perkotaan karena harga minyak semakin tinggi.

Tabel 3
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah, Maret 2006-Maret 2007

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (juta)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Maret 2006	126.163	48.127	174.290	14,49	13,47
Maret 2007	132.258	55.683	187.942	13,56	12,52
Perdesaan					
Maret 2006	102.907	27.677	130.584	24,81	21,81
Maret 2007	116.265	30.572	146.837	23,61	20,37
Kota+Desa					
Maret 2006	114.125	37.872	151.997	39,30	17,75
Maret 2007	123.952	42.704	166.657	37,17	16,58

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2006 dan Maret 2007

nesia pada Maret 2007 adalah 51,11 juta orang (16,58%). Jika dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2006 dengan jumlah 39,30 juta (17,75%), itu berarti jumlah penduduk miskin menurun 2,13 juta. Walaupun persentase orang miskin pada Maret 2007 lebih tinggi dibandingkan Maret 2006. Jumlah penduduk miskin di perdesaan sangat menurun dibandingkan perkotaan pada Maret 2006-Maret 2007. Penduduk miskin di perdesaan turun 1,20 juta sementara di perkotaan turun 0,93 juta (Tabel 2).

Persentase penduduk miskin antara daerah pedesaan dan perkotaan tidak banyak perubahan. Pada Maret 2006 sebagian besar (63,13%) penduduk miskin berada di pedesaan, sementara per Maret 2007 persentase ini hampir sama ada 63,52%. Dari informasi ini, kita tahu bahwa orang yang disebut kaum miskin kota adalah manusia dengan garis kemiskinan makanan

dan non-makanan di bawah Rp 187.942/bulan dan total untuk masyarakat miskin perkotaan di Indonesia pada tahun 2006 adalah 14,49 juta orang.

III. Hasil dan Pembahasan

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

Sejarah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Indonesia

Pada masa rezim Orde Baru, saat Indonesia dipimpin oleh Jenderal Soeharto, strategi penanggulangan kemiskinan telah dilakukan. Pada tahun-tahun awal, beberapa pendekatan ad-hoc diadopsi untuk memberikan bantuan sementara kepada orang miskin. Pada periode berikutnya, mulai dilakukan perencanaan yang sistematis, dengan mendorong pertumbuhan yang tinggi karena dianggap sebagai obat mujarab untuk berbagai masalah ekonomi termasuk kemiskinan. Ketika Presiden Soeharto turun, disadari bahwa efek domino dari proses pertumbuhan tidak bisa diharapkan untuk meringankan beban kemiskinan. Masalah disparitas pendapatan terutama pada tingkat regional sudah sangat mengkhawatirkan yang juga digunakan oleh beberapa politisi sebagai salah satu pembenaran untuk pemisahan Indonesia timur. Selain itu, Indonesia juga memiliki masalah korupsi di lembaga pemerintahan. Pada era Soeharto, korupsi jadi masalah utama. Ada begitu banyak program masyarakat miskin yang dikorupsi oleh rezim Soeharto.

Pemerintahan Soeharto mengungkapkan: "Penduduk miskin sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dan bergantung

pada pertanian [...] Industri yang menyerap banyak tenaga kerja berbasis teknologi dan reformasi tanah akan didorong. Yang terjadi berikutnya adalah pandangan optimis pelaksanaan Instruksi Presiden untuk Daerah Tertinggal (Instruksi Presiden) Desa Tertinggal (IDT)). Instruksi Presiden tentang Desa Tertinggal ini memberi penekanan pada pembangunan infrastruktur pendidikan dasar, kesehatan dasar, kesejahteraan penduduk, sanitasi dan air minum, dengan sasaran daerah pedesaan. Strategi operasional dan segala perangkat telah dirancang dan dana disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengeluaran telah dibelanjakan untuk memastikan pelaksanaan program tersebut secara efektif. Tantangan yang dihadapi oleh program pengentasan kemiskinan perkotaan pada masa-masa akhir rezim Soeharto adalah menyalakan percikan baru antusiasme yang secara efektif akan memanfaatkan energi dari pengangguran perkotaan atau setengah menganggur untuk perbaikan kawasan kumuh, perumahan murah, taman pemberdayaan masyarakat dan fasilitas masyarakat lainnya.

Antara tahun 1998-2001, pemerintahan baru Orde Reformasi yang dipimpin secara berturut-turut oleh B.J. Habibie, Abdurahman Wahid, dan Megawati membuat sejumlah program baru untuk menangani krisis ekonomi dengan program jaring pengaman sosial. Program penyelamatan ini memainkan peran kunci dalam proses pemulihan ekonomi. Strateginya adalah dengan ketahanan pangan, memberikan perlindungan sosial dalam sektor pendidikan dan kesehatan dan mencipt-

takan lapangan kerja produktif. Program ini mencakup PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah untuk Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), CRP (Program Pemulihan Masyarakat), KPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan). Pada program penanggulangan kemiskinan tingkat local, strategi diarahkan terhadap perbaikan kondisi hidup masyarakat kecil (C-KIP) dan Program Penanggulangan Kemiskinan (PAP) di kota Balikpapan. Kedua program itu diprakarsai oleh pemerintah kota, yang meliputi pembangunan fasilitas masyarakat, pengelolaan lahan dan pinjaman rumah dengan memobilisasi sumber daya yang tersedia.

Proyek kemiskinan perkotaan menggunakan nomor ID-P055821 untuk pulau Jawa karena setengah dari penduduk Indonesia tinggal di Jawa dan dinilai dan disetujui pada tanggal 19 April 1999. Proyek ini dirancang sebagai proyek pengentasan kemiskinan perkotaan untuk mengatasi krisis ekonomi 1998. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, proyek ini memasukkan prinsip-prinsip demokrasi, pembangunan partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan desentralisasi sebagaimana tercantum dalam pedoman proyek untuk P2KP pertama (1999). Dengan pendekatan bawah-atas dan transparansi untuk merancang, proyek ini mencakup perbaikan infrastruktur dasar dan pendapatan berkelanjutan yang sebelumnya tergerus oleh inflasi atau karena kehilangan pekerjaan.

Proyek ini menyediakan modal di masyarakat untuk peningkatan pendapatan

berkelanjutan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk pendapatan berkelanjutan oleh kelompok-kelompok di dalam yurisdiksi dan kaum miskin kota. Proyek ini menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan yang dituntut oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Dana untuk mendukung kegiatan ekonomi swasta harus dibayar dalam waktu dua tahun dengan tingkat bunga komersial. Setengah dari pembayaran bunga akan tersedia dan digunakan untuk membantu pemeliharaan keuangan infrastruktur umum lokal dan kegiatan penciptaan lapangan kerja terkait di daerah perkotaan berpenghasilan rendah. Pendanaan untuk infrastruktur umum di masyarakat lokal dilakukan secara hibah. Pekerja membangun atau memperbaiki infrastruktur publik dibayar berdasarkan upah minimum setempat.

Dengan mayoritas orang miskin terkonsentrasi di pulau Jawa, tahap pertama proyek ini dirancang untuk mengatasi kemiskinan penduduk perkotaan yang tinggal di kota-kota besar, terutama Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Proyek ini awalnya menargetkan kaum miskin di sekitar 60 pemerintah daerah di bagian utara Jawa, khususnya di Yogyakarta, Malang dan Bandung yang merupakan kota-kota dengan kepadatan tinggi di daerah perkotaan dan industri kecil. Jumlah penduduk di daerah sasaran ini sekitar 24 juta (Bank Dunia: 1999).

Proyek ini juga bertujuan memperkuat kapabilitas lembaga lokal untuk membantu masyarakat miskin; memobilisasi institusi lokal sektor informal dan swasta

dan keahlian; mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal kemasyarakatan; dan memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. P2KP Kedua (2002-2008) sudah menyertakan dialog yang lebih luas antara masyarakat dan badan pelaksana (Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah) terkait proyek dan program pelatihan yang dipilih (Bank Dunia 2002).

Pengalaman di Kota Bandung

Pada tahun 1998 ketika krisis keuangan merusak sektor ekonomi di Indonesia, dampak dari situasi tersebut membuat kota menjadi salah satu target pertama yang merasakannya, selain ada banyak sektor usaha yang bangkrut yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Pemerintah Indonesia kemudian meluncurkan salah satu program untuk meringankan dampak ini. Mereka menyebutnya Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Dalam P2KP ini ada program untuk membentuk KSM (Kelompok Swadaya Mandiri). Kelompok-kelompok ini akan dikembangkan menjadi KBMK (Kelompok Belajar Mandiri Kelurahan). KBMK ini pada gilirannya akan menjadi salah satu kelompok yang mendampingi dalam kegiatan informasi dan komunikasi pembangunan budaya bagi warga desa. Proyek ini di bawah P2KP dan didanai oleh Bank Dunia.

Sejalan dengan perkembangan sosio-ekonomi, pembangunan infrastruktur perkotaan dan perbaikan kondisi lingkungan dilakukan melalui Program Perbaikan

Kampung (KIP) untuk usaha lokal skala kecil, dan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Terpadu (IUIDP) untuk program setingkat kota. Pembangunan pedesaan diupayakan melalui Program Pembangunan Pedesaan yang terintegrasi dan Pengembangan Pusat-Pusat partum-buhan. Di samping kegiatan itu, produksi skala kecil dipromosikan melalui pemberian insentif seperti pinjaman lunak untuk modal kerja.

Dalam Keppres Nomor 124 tahun 2001 dan Keppres Nomor 8 tahun 2002, pemerintah Indonesia membentuk komite penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Ekonomi sebagai wakilnya. Tugas utama komite ini adalah untuk mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan mengikutsertakan tidak hanya instansi pemerintah tetapi juga pelaku pembangunan lainnya di setiap tingkat pemerintahan serta lembaga legislatif, LSM, universitas, asosiasi profesi, sektor swasta dan masyarakat sipil.

Komite ini bertanggung jawab untuk menentukan pendekatan utama dalam pengentasan kemiskinan dengan: (1). Mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan (2). Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat miskin. Pedoman kebijakan pembangunan yang pro-rakyat miskin ini meliputi: (1) Memaksimalkan pemanfaatan anggaran nasional dan lokal atau APBN dan APBD; (2) Program yang terfokus; (3) sinkronisasi perencanaan dan pemrograman, penetapan sasaran dan pelaksanaan ser-

ta pemantauan dan pengevaluasian penanggulangan kemiskinan; (4) melibatkan LSM dalam memantau dan mengevaluasi program; (5) meningkatkan penyediaan kredit mikro untuk usaha kecil dan menengah dengan bank atau lembaga lain dan penyediaan bantuan teknis dan penguatan lembaga sebagai akibat dari kesepakatan pemerintah dan Bank Indonesia.

Sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik seperti demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi strategi pengentasan kemiskinan sebagai bagian integral dari kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang dengan mengikutsertakan semua instansi terkait. Di samping prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pemerintah Indonesia membuat beberapa strategi yang disebut PRSP (Poverty Reduction Strategy Paper). PRSP meliputi: (1). Identifikasi masalah kemiskinan; (2). Evaluasi program dan kebijakan pengurangan kemiskinan; (3). Strategi dan kebijakan; (4) perumusan program dan sistem pelaksanaannya dan (5) evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program. Sejak tahun 2000 pemerintah bermaksud untuk melaksanakan agenda program penanggulangan kemiskinan sebagai berikut.

1. Menyusun pedoman bagi lembaga lokal untuk merumuskan program pembangunan pro-rakyat miskin dan prosedur penganggaran dan memberikan pendampingan teknis bagi lembaga ini untuk melaksanakan program dan kebijakan secara desentralisasi.
2. Mengevaluasi efektivitas semua prog-

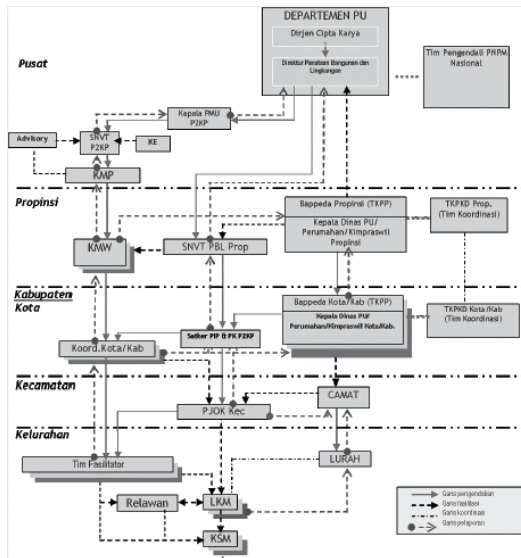
ram penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kerangka kebijakan untuk membuat keputusan dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Membuat daftar alokasi hibah luar negeri untuk setiap program penanggulangan kemiskinan untuk memastikan kompatibilitas dari berbagai program. Pemerintah harus mempublikasikan daftar dan temuan dalam metode partisipatif kepada rakyat miskin.
4. Melakukan analisis kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan dan program untuk peraturan dan keuangan yang pro-rakyat miskin, kredibel, dan akuntabel.
5. Melanjutkan proses perumusan PRSP sebagai bagian integral dari kerangka kerja kebijakan pembangunan jangka panjang.

Gambar 1 di bawah ini melukiskan struktur organisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

Gambar 1
Struktur Organisasi Program Penang-

gulangan Kemiskinan Perkotaan di Indonesia



sumber: <http://www.p2kp.org/aboutdetil.asp?mid=9&catid=3&>

Untuk menjangkau kaum miskin perkotaan di Jawa, KDP versi perkotaan dibentuk dan dimulai pada kuartal kedua tahun 1999. Tujuan P2KP ini adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam rangka membantu warga perkotaan meng-atasi kemiskinan.

IV. Penutup

Pengalaman ini membahas beberapa faktor kegagalan program penanggulangan kemiskinan perkotaan di Indonesia. Ada kesimpulan tentang dibutuhkannya kajian ekstra dalam upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan.

Kajian ini sangat merekomendasikan analisis tambahan dari Pemerintah Indonesia untuk secara mendalam memahami apa yang dimaksud dengan kemiskinan perkotaan, karena karakteristiknya sangat berbeda dengan kemiskinan pedesaan.

Strategi untuk penanggulangannya harus ditingkatkan, tidak hanya menggunakan indikator ekonomi tetapi juga indikator lain seperti sosial, budaya, politik, bisnis dan keterampilan teknis.

Bandung adalah salah satu kota besar yang sudah menjalankan proyek P2KP. Pada bagian ini disinggung sedikit tentang buruknya kondisi penduduk yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui P2KP. Laporan ini pada dasarnya dari penelitian saya di Kecamatan Sukawarna, Bandung.

- 1) Adanya miskoordinasi antara Sektor Swasta, Komite, dan Pemerintah.
- 2) Sebagian besar kredit mikro yang diberikan kepada penduduk miskin, tidak digunakan untuk kepentingan usaha, tapi untuk konsumsi sehari-hari (kebanyakan mereka keluarkan untuk sekolah anak-anak dan membeli makanan untuk konsumsi sehari-hari).
- 3) Penduduk miskin di Bandung tidak mendapatkan pelatihan yang baik untuk menjalankan usaha dengan baik. Setelah proposal disetujui oleh pemerintah, tidak ada konsultasi antara pemerintah dan masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin tetap tidak tahu bagaimana cara menjalankan usaha dari awal.
- 4) Ada semacam budaya kemiskinan di Indonesia, yang terlihat dari sebagian orang miskin yang menggunakan uang dari pemerintah untuk dihabiskan, dengan prinsip bahwa “Uang Pemerintah adalah uang rakyat”. Hal ini menyedihkan karena Pemerintah Indonesia

- mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia yang harus dibayar oleh generasi berikutnya
- 5) Dari penelitian lain ditemukan bahwa orang-orang miskin di Bandung menunjukkan gejala budaya pasca-populis meniru orang kaya (Hedonisme) dengan menghabiskan uang untuk hal-hal selain kebutuhan dasar. Misalnya, ada beberapa responden yang membeli sepeda motor menggunakan uang dari P2KP, karena dia ingin terlihat seperti orang kaya.

Daftar Pustaka

- Andre Bayo Ala, 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Ariffin Jamilah, 1994. *Poverty Amidst Plenty*, Petaling Jaya, Selangor: Pelanduk Publications.
- Arjan, de Haan, 1995. *Bibliographical Review on Social Exclusion in South Asia*, Discussion Paper Series No.79, Geneva: International Institute for Labour Studies.
- Badan Pusat Statistik, 2007. *Population of Indonesia. Result of the 2007 Population Census*. Series L.2.2. Jakarta : Badan Pusat Statistik,
- Badan Pusat Statistik, 2006. *Pedoman Penyandian Propinsi, Kabupaten/Kotamadya dan Suku Bangsa. Sensus Penduduk 2007*. [Coding Guides for Provinces, Regencies/ Municipalities and Ethnic Groups. 2000 Population Census]. Jakarta : Badan Pusat Statistik,
- Badan Pusat Statistik, 2007b. *Population of Jawa Barat. Result of the 2007 Population Census*. Series L.2.2.14. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Barry, C., Morrison, C. M., & Ellis, A. W. (1997). Naming the Snodgrass and Vanderwart pictures: Effects of age of acquisition, frequency, and name agreement. *Quarterly Journal of Experimental Psychology A*, 50, 560–585.
- Barry J.L., et al. 1997. Digestive and metabolic effects of potato and maize fibres in human subjects. *Br. J. Nutr.*, 77 (1): 33-46.
- Barry, C., Morrison, C. M., & Ellis, A. W. (1997). Naming the Snodgrass and Vanderwart pictures: Effects of age of acquisition, frequency, and name agreement. *Quarterly Journal of Experimental Psychology A*, 50, 560–585.

- Balogh, T., 1966. *The Economics of Poverty*, London: Weidenfeld and Nicholson
Abdul Aziz., 1964. "Poverty and Rural Development in Malaysia", *Kajian Ekonomoi Malaysia*, Vol.1, No.1, Jun.
- Bappeda Kota Bandung, 2002, *Evaluasi Perguliran Dana Program P2KP di Kota Bandung*. Bandung, Bappeda.
- Baum, W.C., 1990, *Investasi Dalam Pembangunan : Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia 11*, Cet 2, Jakarta : Universitas Indonesia
- Booth, S.R., 1901. *Poverty: A Study of Town Life*, London: Macmillan
- Chamhuri Siwar dan Mohd Hafiah Piei, 1988a. *Dasar dan Strategi Pembasmian Kemiskinan - Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Chamhuri Siwar dan Mohd Hafiah, 1988b. *Isu, Konsep dan Dimensi Kemiskinan (Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan)*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Chamhuri Siwar dan Mohd. Amin Mohd. Anuar, 1989. "Kemiskinan Di Kalangan Petani Padi: Kajian Kes Di Besut, Kemubu, Seberang Perai, Tanjung Karang dan Jasin", *Penerbitan Tak Berkala* No.38, Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.
- Chubut, C; Aube, A.C; Mekki, N; Dubois, C; Lairon, D; Barry, J.L. (1997). Digestive and metabolic effects of potato and maize fibres in human subjects. *Br. J. Nutr*, 77 (1): 33-46.
- Diknas Kota Bandung, 1998, Kertas Kerja, "*Perspektif Penduduk terhadap pengaruh Pendidikan Globalisasi*", Bandung, Kantor Pendidikan Nasional Indonesia.
- Earth Institute, 2004. Energy service for the poor (Commissioned paper for the Millennium Project Task Force 1). Vijay Modi, Professor Earth Institute and Departement of Mechanical Engineering Colombia University
- Ercelawn, 1990 "Absolute Poverty in Pakistan: Poverty Lines, Incidence, Intensity" University of Karachi, Applied Economics Research Centre.
- Frank, A.G., 1973. "The Development of Underdevelopment", dlm. C.K. Wilber, ed., *The Political Economy of Development and Underdevelopment*, New York: Random House.
- Friedmann, J., 1979. "Urban Poverty in Latin America - Some Theoretical Considerations", dalam *Development Dialogue*, Vol.1, April, ms 45-48

George, V. dan I. Howards, 1991. *Poverty Amidst Affluence - Britain and the United States*, London, England: Edward Elgar.

Harian Media Indonesia, 10 Juli 1999, *Penduduk Miskin Indonesia*

Holland, J. L., Powell, A., & Fritzsche, B. (1994). *SDS professional user's guide*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.

Institut Pertanian Malaysia (AIM), 1983/1984. *Kemiskinan Luar Bandar*, Kuala Lumpur.

Jamasy, O., 2004, *Keadilan, pemberdayaan dan penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Belantika

Kamal Salih, 1983/1984. "Konsep, Definisi dan Pengukuran Kemiskinan", dlm. Institut Pertanian Malaysia (AIM), *Kemiskinan Luar Bandar*, Kuala Lumpur: AIM.

Kartasmita, G., 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : PT Pustaka

Kozel, V, 1999. *New Approaches, New Methods, The need for Cross Disciplinary Research on Poverty*. *WDR on Poverty and Development 2000/01*, Stiglitz Summer Research Workshop on Poverty, Washington DC.

Lewis, O., 1966. *La Vida: a Puerto Rican Family in Culture of Poverty*, San Juan and New York: Random House.

Lipton, M. (1983) *Poverty Undernutrition and Hunger*. Word Bank staff Working Paper No. 597 (Washington, D.C.: Word Bank).

Miller S.M. and W. Bloomberg Jr, 1970. "Shall the Poor Always be Impoverished", dlm. Warner Bloomberg, Jr., and Henry J. Schmandt, eds., *Urban Poverty: Its Social and Political Dimensions*, California: Sage Publication, Inc.

Mohd Razali Agus, 2005, "Persetingan di Malaysia: Penduduk dan Penempatan Semula", Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya .

Mohd Razali Agus, 2001, *Perumahan Awam di Malaysia*; Dasar dan Amalan Kuala Lumpur, Utusan Publication & Distribution Sdn. Bhd.

Mohd Taib Dora, 2000. *Peminggiran Sosial: Keluarga Melayu Termiskin Bandar*, Skudai, Johor Darul Ta'zim: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Nor Ghani, 1977. "Dimensions of Poverty and Poverty Eradication Programmes", dlm. B.A.R. Mokhzani dan Khoo Siew Mun, *Some Case Studies on Poverty in Malaysia - Essays Presented to Professor Ungku A. Aziz*, Kuala Lumpur: Persatuan Ekonomi Malaysia.

- Muhammad Ayub.(2007). *Understading Islamic Finance*. England: John Wiley & Sons.
- Myrdal, G., 1970. *The Challenges of World Poverty: A World Anti-Poverty Programme in Outline*, New York: Vintage Books.
- Naseem, S. M. (1973) Mass Poverty in Pakistan: Some Preliminary Findings. *The Pakistan Development Review* 12:4, 312–360.
- Nayak, P., 1995. *Economic Development and Social Exclusion in India*, Geneva: International Institute for Labour Studies.
- Orshansky, M. (1965), Counting the Poor: Another Look at the Poverty Profile, *Social Security Bulletin*, Vol. 28.
- Osman Rani Hassan dan Abdul Majid Salleh 1988. “Konsep-Konsep Kemiskinan dan Ketaksamaan: Satu Tinjauan”, dalam Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah, *Isu, Konsep dan Dimensi Kemiskinan (Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan)*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Piachaud, D., 1987. “Problems in the Definition and Measurement of Poverty”, *Journal of Social Policy*, Vol.16, No.2. ms. 147-164.
- Ravallion, M. , 1994, “*Poverty Comparisons, Fundamentals of Pure and Applied Economics*”, Switzerland: Harwood Academic Publishers.
- Rein, M., 1970. “Problems in the Definition and Measurement of Poverty”, dlm. Peter Townsend, *The Concept of Poverty: Working Papers on Methods of Investigation and Life-Style of the poor in Different Countries*, London: Heinmann Educational Books Ltd.
- Rowntree, S. (1901), *Poverty: A Study of Town Life*, Macmillan, London.
- Scott, W., 1979. “Poverty Monitoring in Developing Countries”, *Development and Change*, Vol.10, No.3, July.
- Sen, A., 1981. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deorication*, Oxford: Clarendon Press.
- Sukhtame. P.(1982) *New Concepts in Nutrition and Their Implications for Policy* (Pune: Maharashtra Association for the Cultivation of Science)
- Sukmana, O., 2005, *Sosiologi dan Politik Ekonomi*, Malang, Jawa Timur: UMM Publication.

Surathman Kastin Hassan, 1996. “Kemiskinan dan Pembasmian Kemiskinan Mengikuti Perspektif Islam”, dlm. Chamhuri Siwar dan Nor Aini Hj Idris, sunt., *Kemiskinan Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia*.

Syed Othman Alhabsyi, 2000. “Solving Absolute Poverty Using answers Found in Religion”, <http://vlib.unitark11.edu.my/staff-publications/datuk>.

Syed Othman Alhabsyi, 1996. “*Poverty Eradication From Islamic Perspectives*”, <http://vlib.unitark11.edu.my/staff-publications/datuk>, layari pada Ogos 2000.

Tim Persiapan P2KP, 1999, *Manual Proyek P2KP Buku Satu Pedoman Umum*. Jakarta

Townsend, P., 1979. *Poverty in the United Kingdom - A Survey of Household Resources and Standards of Living*, England: Penguin Books.

Ungku Abdul Aziz, 1975c. “*Recent Thoughts on Poverty*”, Workpaper presented in Second Malaysian Economic Convention, Kuala Lumpur.

Wan Sulaiman Wan Yusoff, “*Modern Approach of Zakat as an Economic and Social Instrument for Poverty Alleviation and Stability of Ummah*”, workpaper presented in CPDS (Centre For Poverty and Development Studies) University of Malaya, Kuala Lumpur.

Winter, A.J., 1969. *The Poor: A Culture of Poverty or a Poverty of Culture?*, Michigan: William B. Eerdmans Publisher.

Word Bank (1999). *Coporate Governance: Framework for Implementation, Overview*. www.worldbank.org.pp.5

World Bank (2002) *Poverty in Pakistan: Vulnerabilities, Social Gaps, and Rural Dynamics*. Washington, D.C.: World Bank.

Yogi, S dan Iksan, M, (2006) *Standar Pelayanan Publik di Daerah*, Penerbit PKKOD-LAN, Jakarta.

